

## Peran Pemerintah Kota Makassar dalam Pengentasan Kemiskinan pada program UEP dan KUBE

Andi Fitrah P. Putra (Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin)  
Juanda Nawawi (Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin)  
Rahmatullah (Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin)  
Email: fitrah.perdanap@gmail.com

### Abstract

*This study aims to to know and to analyze the role of the city government makassar for reducing poverty of the program and know and analyze of factors affect the implementation of the program .Research methodology used is the method the qualitative study , which is a analysis who seek relations and the meaning of the data expressed in the form of statements , tafsiran-commentary on after obtain information from informants who selanjut based on the research done that has been done , the role of the city government makassar for reducing poverty basically have dilaksana-right by a work unit ( skpd ) sample in research were department of social city Makassar. As for poverty reduction programs referred to are very poor empowerment program the assistance programs productive economic undertakings ( uep ) and assistance programs joint business group ( kube ). Then the being deficient in the implementation of the program tersebut that is a number of targets in indicators target which is not attainable fully .And in fact overall both these programs done relatively well.*

**Keywords:** *proverty, joint economy enterprise, productive economic group*

### Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran pemerintah kota Makassar dalam pengentasan kemiskinan yang berupa program serta mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, yaitu suatu analisis yang berusaha mencari hubungan dan makna dari data yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan-pernyataan, tafsiran-tafsiran setelah menggali informasi dari para informan yang selanjut Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peran pemerintah kota Makassar dalam pengentasan kemiskinan pada dasarnya telah dilaksana-kan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menjadi sampel dalam penelitian yaitu Dinas Sosial Kota Makassar. Adapun program pengentasan kemiskinan yang dimaksud adalah program pemberdayaan fakir miskin yakni program bantuan usaha ekonomi produktif (UEP) dan program bantuan kelompok usaha bersama (KUBE). Kemudian yang menjadi kekurangan dalam pelaksanaan program tersebut yaitu adanya beberapa target pada indikator sasaran yang tidak dicapai sepenuhnya. Namun secara keseluruhan kedua program ini telah terlaksana dengan cukup baik.*

**Kata kunci:** *kemiskinan, usaha ekonomi bersama, kelompok ekonomi produktif*

---

### PENDAHULUAN

Pemerintah Merupakan salah satu syarat penting dalam teori pembentukan negara.

Pemerintah dalam suatu wilayah berperan sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu yang men-

jadi kekuasaannya. Pemerintah mempunyai kekuasaan dan berperan sebagai lembaga yang mengurus masalah kenegaraan dan memajukan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu pemerintah juga memiliki bertanggung jawab besar atas kemajuan kesejahteraan rakyat termasuk dalam pengentasan kemiskinan.

Sejalan dengan perkembangan kota Makassar, khususnya tujuan Makassar yang menuju kota dunia, menjadi sebuah daya tarik yang kuat yang dapat menjanjikan berbagai harapan dan berbagai macam tujuan. Sehingga salah satu akibatnya munculnya dampak sosial diantaranya adalah urbanisasi. Urbanisasi dapat memacu pertumbuhan populasi komunitas masyarakat marginal yang semakin pesat, maka kota Makassar mau tidak mau akan diperhadapkan pada permasalahan kesejahteraan sosial yang semakin kompleks, di antaranya adalah permasalahan kemiskinan. Semakin pesatnya pertumbuhan populasi masyarakat di Makassar merupakan salah satu faktor yang harus di perhatikan pemerintah kota Makassar dalam mencari solusi dalam upaya pengentasan kemiskinan hingga ke level terendah, sehingga masalah kemiskinan bukan lagi menjadi hal yang mustahil untuk di tuntaskan.

Berdasarkan peraturan walikota Makassar Nomor 34 Tahun 2009 tentang uraian tugas jabatan struktural dinas sosial kota Makassar telah dijelaskan bahwa dinas sosial juga memiliki tugas dalam penuntasan masalah kemiskinan.

Memperhatikan uraian di atas terlihat bahwa kemiskinan merupakan persoalan yang patut bagi pemerintah daerah kota Makassar untuk segera memaksimalkan peran yang dimilikinya terutama dalam pembuatan perencanaan strategis dalam pengentasan kemiskinan yang saat ini masih meresahkan masyarakat. Bilamana telah terjadi penurunan angka kemiskinan, maka patut pula untuk mengetahui upaya apa yang telah dilakukan sebagai bahan evaluasi kebijakan

ke depannya. Sehingga penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Analisis Peran Pemerintah Kota Makassar Dalam Pengentasan Kemiskinan Pada Program UEP dan KUBE”

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut yang pertama penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan di Kota Makassar. Kemudian yang kedua untuk mengetahui dan menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan di Kota Makassar.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian dilakukan di kota Makassar. Kemudian sampel wilayah yang di ambil adalah tiga kecamatan yang memiliki persentase jumlah keluarga fakir miskin terbanyak. Kecamatan yang dimaksudkan antara lain kecamatan Mariso, kecamatan Makassar, dan kecamatan Tallo. Menekankan lokus penelitian pada pemerintah kota sebagai perwujudan Negara di daerah yang berkewajiban menyejahterakan masyarakatnya. Penelitian ini dilakukan di kantor pemerintah kota Makassar terkhusus di kantor dinas sosial kota Makassar sebagai institusi yang mengurus masalah-masalah sosial termasuk masalah kemiskinan.

Dasar penelitian yang dilakukan adalah observasi melalui wawancara dengan pertanyaan terbuka yaitu penelitian dengan mengumpulkan data dari informan atau menemukan ruang lingkup dan fokus persoalan tertentu sebagai sampel yang dianggap representative sedangkan informan adalah orang-orang yang berada dalam lingkup penelitian atau orang yang paham betul atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan dari penelitian ini terdiri dari seluruh komponen yang terlibat langsung dalam pengentasan kemiskinan di kota Makassar seperti : 1) Kepala bidang

pengendalian bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial dinas sosial kota Makassar; 2) Kepala seksi pemberdayaan fakir miskin dinas sosial kota makassar; 3) Kepala seksi jaminan kesejahteraan sosial dinas sosial kota makassar; 4) Tenaga kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK); 5) pegawai kelurahan; 6) Masyarakat miskin penerima program bantuan UEP dan KUBE.

Tipe Penelitian adalah tipe penelitian deskriptif analisis yaitu suatu tipe penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau lukisan situasi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai objek yang diselidiki di mana hasil eksplorasi merupakan jawaban dari pertanyaan yang telah dirumuskan dilanjutkan dengan penjelasan secara rinci dan mendetail tentang bagaimana peran pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. Selanjutnya menganalisa dan menafsirkan fakta-fakta dari hasil eksplorasi, kemudian mengambil kesimpulannya.

Sumber Data dalam penelitian ini adalah a) Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber asalnya, data primer diperoleh melalui Observasi dan Interview atau wawancara mendalam yang bertujuan untuk menggali informasi yang lebih mendalam tentang berbagai aspek yang berhubungan dengan permasalahan penelitian; b) Data Sekunder, yaitu data yang telah diolah sebelumnya yang diperoleh dari studi kepustakaan, maupun studi dokumentasi.

Dalam penelitian digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut, anatar lain a) Penelitian Lapangan (field research) studi lapang ini dimaksudkan bahwa penulis langsung melakukan penelitian pada lokasi atau objek yang telah ditentukan yang hasilnya merupakan data primer. Studi lapang ditempuh dengan cara observasi dan Interview atau Wawancara Mendalam; b) Studi Kepustakaan (library research) Pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca literatur-literatur yang berhubungan tentang buku/artikel terkait peran pemerintah daerah

dalam penanggulangan kemiskinan, serta dokumen-dokumen yang ada relevansinya dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini. Data yang diperoleh dari kepustakaan ini merupakan data sekunder.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kemiskinan di kota Makassar merupakan masalah yang sangat penting untuk di atasi dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan, maka dari itu peran pemerintah kota Makassar sangat di perlukan. Menurut Soerjono soekanto peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran. Kemudian hal serupa juga di tambahkan dari pendapat Horton dan Hunt mengemukakan bahwa peran adalah perilaku yang di diharapkan dari seseorang yang mempunyai status.

Dinas Sosial dalam hal ini sebagai bagian dari lembaga pemerintah kota Makassar yang berfokus pada pembangunan kesejahteraan sosial harusnya sangat berperan dalam pengentasan kemiskinan, antara lain melaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat fakir miskin. Pemberdayaan fakir miskin merupakan salah satu upaya strategis nasional dalam mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan yang berkeadilan sosial dan melindungi hak asasi manusia terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia.

Berdasarkan hasil observasi, dokumentasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, maka dalam pembahasan ini dapat secara rinci dijabarkan sebagai berikut: Terkait bagaimana pelaksanaan program pemberdayaan fakir miskin yakni program bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan program bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), program ini awalnya merupakan program yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk selanjutnya dil-

aksanakan oleh Dinas Sosial yang ada di seluruh daerah di Indonesia. Dinas Sosial sebagai bagian dari pemerintah kota Makassar menyelenggarakan Program Pemberdayaan Fakir Miskin yakni program bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan program bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dengan pemberian bantuan berupa peralatan dan bahan sesuai dengan usaha yang diinginkan.

Program bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Program bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan program-program andalan Dinas Sosial kota Makassar dalam rangka pemberdayaan keluarga miskin. Dengan adanya program ini, diharapkan dapat memberikan dampak yang positif yakni membantu keluarga miskin dalam meningkatkan taraf hidupnya. Selain itu, pelaksanaan program ini juga merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan dan memajukan pembangunan nasional, khususnya pada sektor ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat.

Adapun program yang diupayakan pemerintah dalam memajukan pembangunan ekonomi yaitu program Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Usaha Ekonomi Produktif (UEP) adalah kegiatan di bidang ekonomi yang dilaksanakan oleh Rumah Tangga untuk meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja dan ketahanan pangan masyarakat berbasis sumber daya lokal. Program bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) merupakan salah satu kegiatan program pemberdayaan fakir miskin oleh dinas sosial kota Makassar dengan memberikan bantuan modal usaha untuk kegiatan usaha ekonomi produktif atau memberikan bantuan modal berupa alat dan bahan untuk usaha yang akan di geluti, sehingga diharapkan mampu meningkatkan ketersediaan pangan bagi keluarga fakir miskin sehingga mampu bangkit dari keterpurukan.

Program bantuan UEP merupakan media yang strategis, efektif dan efisien dalam upaya pemberdayaan masyarakat, khususnya bagi keluarga fakir miskin sebagai bentuk perwujudan dari amanat UUD 1945 pasal 34 ayat (1) dan (2), serta Undang-undang no. 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. Program UEP diharapkan mampu menjadi sarana yang efektif dan efisien untuk mendorong pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat khususnya bagi keluarga fakir miskin untuk berkembang. Sasaran penerima bantuan UEP diprioritaskan kepada keluarga fakir miskin yang terdaftar pada kantor kecamatan atau kelurahan. Sasaran Out Come dari kegiatan UEP adalah meningkatnya kegiatan usaha masyarakat untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi masyarakat, meningkatnya pendapatan serta berkurangnya tingkat kerawanan pangan dan gizi. Hal tersebut juga dibenarkan oleh bapak La heru selaku Kepala seksi Jaminan Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Kota Makassar, beliau menyatakan bahwa :

“UEP merupakan program dinas sosial untuk memberdayakan keluarga miskin dalam bentuk bantuan modal usaha. Modal usaha ini berupa peralatan dan bahan untuk usaha mereka nantinya.”

Beliau juga menambahkan bahwa : “usaha yang akan mereka jalankan nantinya disesuaikan dengan kemampuan si penerima bantuan ini misalnya masyarakat ini bisa memasak gorengan maka nantinya bantuannya berupa peralatan dan bahan untuk membuat gorengan.”

Pendapat serupa juga dinyatakan oleh informan lainnya yaitu ibu Sitti hajar selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Makassar, beliau menyatakan bahwa:

“Program bantuan UEP merupakan salah satu program kami untuk membantu keluarga fakir miskin untuk meningkatkan perekonomian keluarganya supaya mampu melengkapi kebutuhan sehari-harinya.”

Beliau juga menambahkan bahwa: “sasaran dari program ini adalah keluarga fakir miskin yang memenuhi kriteria miskin kami salah satunya tidak memiliki kemampuan untuk melengkapi kebutuhan sehari-harinya. Bantuan ini berupa permodalan usaha berupa barang tujuannya agar masyarakat bisa mandiri setelah menerima bantuan ini jika di ibaratkan kami memberikan pancing bukannya ikan, agar masyarakat ini bisa berusaha mencari ikan sendiri.”

Dari pernyataan para informan diatas, dapat dikatakan bahwa program bantuan usaha ekonomi produktif (UEP) merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya pengentasan kemiskinan yakni pelaksanaan program pemberdayaan fakir miskin. Adapun sasaran program ini adalah keluarga fakir miskin yang tidak mempunyai sumber pencaharian atau memiliki mata pencaharian tetapi sangat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Tujuan dari program ini secara umum adalah menciptakan media pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. prosedur pendaftaran yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk menjadi penerima program bantuan ini antara lain a) Terdaftar sebagai keluarga fakir miskin di kelurahan masing-masing; b) Dinas sosial dalam hal ini TSKS melakukan proses seleksi dengan pendataan kembali dan penulisan di lapangan disesuaikan dengan data dari kelurahan untuk menilai layak atau tidaknya keluarga tersebut dalam menerima bantuan; c) Keluarga yang dinyatakan layak selanjutnya akan diberikan bantuan modal usaha berupa alat dan bahan usaha di sesuaikan dengan usaha yang akan dijalankan; d) Setelah menerima bantuan UEP keluarga tersebut memulai usahanya didampingi oleh petugas dari dinas sosial kota Makassar. Memperhatikan prosedur pendaftaran di atas dapat dikatakan mudah untuk dilakukan oleh masyarakat miskin yang ingin menerima bantuan UEP karena hanya

dengan mendaftarkan diri sebagai keluarga miskin di kantor kelurahan.

Program selanjutnya yang dilakukan pemerintah yaitu program bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah himpunan dari keluarga yang tergolong miskin dengan keinginan dan kesepakatan bersama membentuk suatu wadah kegiatan, tumbuh dan berkembang atas dasar prakarsa sendiri, saling berinteraksi antara satu dengan yang lain, dan tinggal dalam satuan wilayah tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas anggotanya, meningkatkan relasi sosial yang harmonis, memenuhi kebutuhan anggota, memecahkan masalah sosial yang dialaminya dan menjadi wadah pengembangan usaha bersama (Kemensos RI, 2011).

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Burhanuddin Ghalib selaku kepala bidang jaminan bantuan dan pengendalian kesejahteraan sosial dinas sosial kota Makassar, beliau menyatakan bahwa:

“KUBE adalah kelompok usaha bersama yang dimaksudkan yakni kumpulan keluarga miskin yang membentuk suatu kelompok usaha untuk tumbuh, berkembang dan saling berinteraksi antara satu dengan yang lain serta tinggal di wilayah yang sama. Tujuannya untuk meningkatkan produktivitas anggotanya dalam memenuhi kebutuhan keluarganya masing-masing. Kemudian dalam bidang kami ada yang disebut seksi pemberdayaan fakir miskin yang mengurus masalah-masalah keluarga miskin melalui program-program kami inilah yang menjadi solusi untuk masalah tersebut salah satunya adalah program KUBE ini.”

Dari penuturan dari informan diatas, dapat dikatakan bahwa program bantuan kelompok usaha bersama (KUBE) merupakan sarana koordinasi dan kolaborasi yang produktif sebagai bagian tak terpisahkan dari upaya pengentasan kemiskinan yakni pelaksanaan program pemberdayaan fakir miskin.

Adapun sasaran program ini adalah keluarga fakir miskin yang tidak mempunyai sumber pencaharian atau memiliki mata pencaharian tetapi sangat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar (pangan, sandang, air bersih, kesehatan dan pendidikan). Tujuan dari program ini secara umum adalah menciptakan media pemberdayaan dalam rangka pengentasan kemiskinan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan keberfungsian sosial keluarga miskin.

Prosedur pendaftaran yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk menjadi penerima program bantuan ini antara lain, a) Pengajuan proposal usaha oleh masyarakat yang tergabung dalam kelompok kepada Dinas Sosial Kota Makassar; b) Dinas sosial melakukan proses seleksi dengan pendataan dan penulusuran di lapangan untuk menilai kelayakan kelompok tersebut dalam menerima bantuan; c) Kelompok yang lolos seleksi selanjutnya akan diberikan bantuan modal usaha berupa alat dan bahan usaha di sesuaikan dengan proposal usaha yang di usulkan; d) Kemudian setelah lolos seleksi kelompok tersebut harus mengikuti pelatihan terkait Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang di adakan oleh dinas sosial kota Makassar; dan e) Setelah menerima bantuan KUBE kelompok memulai usahanya sesuai dengan proposal dan didampingi oleh petugas dari dinas sosial kota Makassar.

Kemudian terkait dengan proses pendampingan, tentu saja ini masih menjadi hal yang penting dilakukan dalam pengembangan kelompok yang belum mandiri dalam pengembangan diri anggota maupun kelompoknya. Program KUBE ada banyak tantangan yang akan dihadapi di lapangan oleh para penerima bantuan KUBE sehingga perlu dilakukan kegiatan pendampingan terhadap tiap penerima bantuan KUBE tersebut. Pendampingan dilakukan agar upaya penumbuh kembangan KUBE terlaksana dengan baik dan berkesinambungan. Pendampingan dalam hal ini dipahami sebagai suatu proses menjalin

relasi sosial antara pendamping dengan para anggota KUBE dalam rangka memperkuat dukungan, memecahkan masalah, memotivasi, memfasilitasi dan menjembatani kebutuhan anggota KUBE dalam menjalankan usahanya.

Dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kegiatan pendampingan, para pendamping dapat menjalankan peran berikut ini, a) Perencana; b) Motivator; c) Pembimbing; d) Penghubung; e) Peneliti; f) Fasilitator; g) Mobilisator dan alokator; h) Advokat; i) Evaluator.

Proses pendampingan bagi KUBE menjadi salah satu aspek yang berpengaruh besar dalam menentukan keberhasilan program ini untuk mencapai keefektifan dalam pelaksanaannya. Pendampingan dari pihak-pihak yang berkompeten merupakan salah satu kebutuhan mendasar dari kelompok-kelompok KUBE yang terbentuk. Dengan adanya pendampingan, anggota anggota kelompok dapat terbantu dalam mendapatkan akses informasi tentang program KUBE, prosedur pendaftaran, penjalanan usaha hingga membantu kelompok dalam hal memecahkan masalah dan kendala yang dihadapi selama menjalankan usaha.

Adapun faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan di Kota Makassar

a. Faktor penghambat

• Komunikasi

Komunikasi merupakan suatu hal yang sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari pelaksanaan atau implementasi suatu program. Demikian halnya dengan program usaha ekonomi produktif (UEP) dan program kelompok usaha bersama (KUBE) pada Dinas Sosial Kota Makassar yang tentunya akan terlaksana secara efektif apabila komunikasi antara pihak-pihak yang terkait berjalan dengan baik.

Komunikasi yang terjalin dengan baik antara pihak Dinas Sosial selaku pelaksana program dengan masyarakat selaku sasaran

utama dari program UEP dan KUBE menjadi hal yang mutlak diperlukan demi tercapainya keefektifan pelaksanaan program UEP dan KUBE ini. Bentuk komunikasi disini tentunya dapat diinterpretasikan melalui proses sosialisasi program kepada masyarakat yang merupakan sasaran dari program yang bersangkutan.

Sosialisasi menjadi kunci utama keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan serta sasaran yang diharapkan. Melalui proses sosialisasi yang efektif kepada masyarakat, suatu program akan dengan mudah mencapai keberhasilan dalam pelaksanaannya. Hal ini dapat terjadi karena semakin baik proses sosialisasi dari suatu program maka akan semakin baik pula pemahaman masyarakat akan konsep dan tujuan dari program tersebut. Dengan begitu masyarakat akan semakin terdorong untuk mengakses informasi lebih jauh mengenai program ini serta ambil bagian dalam program yang dilaksanakan oleh pemerintah tersebut.

Terkait proses sosialisasi program UEP dan KUBE yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar, setelah penulis melakukan penelusuran melalui wawancara ditemukan bahwa proses sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah sendiri kurang maksimal.

- Sumberdaya

Sumber daya merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan. Walaupun isi program sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila penyelenggara kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, pelaksanaan program tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berupa wujud sumber daya manusia dan sumber daya financial. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

Sumber daya manusia merupakan hal penting dalam pelaksanaan program antara lain staf atau pegawai (*street-level bureau-*

*crats*). Kegagalan yang sering terjadi dalam pelaksanaan program, salah-satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup menyelesaikan persoalan pelaksanaan program, tetapi diperlukan sebuah kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam melaksanakan program.

Kemudian terkait sumber daya financial dalam pelaksanaan program UEP dan KUBE, masalah anggaran tentu merupakan salah satu hal mendasar yang menentukan jalannya suatu program agar mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan. Tanpa adanya sumber pendanaan dan penganggaran yang baik, pelaksanaan suatu program akan mengalami hambatan serta tidak akan berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, salah satu aspek pendanaan seharusnya mendukung keberhasilan pelaksanaan program UEP dan KUBE yang dijalankan selama ini adalah anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah untuk pelaksanaan program UEP dan KUBE ini.

- b. Faktor pendukung

- Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik atau sikap yang dimiliki oleh pihak penyelenggara program dalam hal ini pihak dinas sosial seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila pihak dinas sosial memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan program dengan baik seperti apa yang diinginkan. Berkaitan dengan disposisi yang dimiliki oleh penyelenggara program dalam hal ini dinas sosial kota Makassar sudah cukup baik. Jadi disposisi atau sikap yang dimiliki oleh pihak dinas sosial bukan menjadi hal yang menghambat pelaksanaan program UEP dan KUBE.

- Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red tape*, yakni prosedur

birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Namun jika dikontekskan dengan dinas sosial kota Makassar, struktur organisasi dinas sosial bisa dikatakan tidak panjang karena dinas sosial memiliki unit pelaksana teknisnya sendiri sehingga dalam pelaksanaan programnya tidak berbelit-belit.

Kemudian terkait Standard operational Procedure (SOP)-nya sudah cukup baik sehingga masih diterapkan hingga saat ini dan jelas bahwa struktur organisasi bukan merupakan faktor penghambat pelaksanaan program melainkan faktor yang menjadi pendukung terlaksananya program-program tersebut.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis pada pembahasan penelitian, maka didapatkan kesimpulan bahwa peran pemerintah kota Makassar dalam mengentaskan kemiskinan dapat dilihat dari bagaimana upaya-upaya yang dilakukannya, upaya yang dimaksud dalam penelitian ini dalam bentuk program pengentasan kemiskinan. Dinas sosial kota Makassar yang merupakan instansi yang paling dekat dengan masalah kemiskinan sangat berperan pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah kota Makassar salah satunya melalui program pemberdayaan fakir miskin seperti program bantuan usaha ekonomi produktif (UEP) dan program bantuan Kelompok usaha bersama (KUBE). Program bantuan UEP dan program bantuan KUBE merupakan program yang sasarannya adalah keluarga fakir miskin atau kurang mampu. Tujuan program tersebut adalah berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial keluarga miskin dalam rangka percepatan pengentasan kemiskinan di Indonesia secara umum dan di kota Makassar secara khusus.

Program bantuan UEP adalah bantuan usaha untuk keluarga fakir miskin yang total

bantuannya bernilai 2 juta rupiah perkeluarga sedangkan program bantuan KUBE adalah bantuan usaha untuk keluarga fakir miskin yang telah membentuk suatu kelompok dengan komposisi 10 orang tiap kelompoknya dan total bantuannya bernilai 22 juta perkelompok usaha bersama (KUBE). Adapun efektif tidaknya pelaksanaan program-program ini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, didapatkan hasil bahwa dalam pelaksanaannya ada beberapa hal yang dilakukan kurang maksimal, hal tersebut dikarenakan karena beberapa faktor. Namun secara keseluruhan pelaksanaan program bantuan UEP dan program bantuan KUBE ini sudah cukup efektif dilihat dari terlaksananya program-program tersebut dilihat dari tersalurkannya bantuan sesuai rencana dan ketepatan sasaran serta anggaran untuk pelaksanaan program-program tersebut.

Selain itu dalam penelitian ini juga berupaya mencari faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan dari program UEP dan KUBE dengan menggunakan teori George C. Edwards III (1980), faktor-faktor yang dimaksud meliputi empat variabel, yaitu: 1) Komunikasi; 2) Sumber daya; 3) Disposisi; dan 4) Struktur birokrasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis faktor-faktor tersebut kemudian terbagi menjadi dua yakni : faktor penghambat dan faktor pendukung. Faktor penghambat pelaksanaan program bantuan UEP dan program bantuan KUBE antara lain faktor komunikasi dan sumber daya. Faktor komunikasi dan faktor sumber daya baik itu sumber daya manusia dan sumber daya finansial dapat dikatakan masih kurang dalam pelaksanaan program ini. Kemudian faktor pendukung pelaksanaan program bantuan UEP dan program bantuan KUBE antara lain faktor disposisi dan faktor struktur birokrasi. Berdasarkan hasil penelitian ini didapatkan hasil bahwa disposisi dari pihak dinas sosial dan struktur birokasinya tidak menghambat masyarakat untuk menjadi penerima bantuan malahan



mempermudah pelaksanaan program bantuan UEP dan Program bantuan KUBE.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Agussalim. 2009. Mereduksi Kemiskinan, Sebuah Proposal Baru untuk Indonesia. Makassar: Nala Cipta Litera.

Arief, Hasrat, dkk. 2014. Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi. Makassar: Universitas Hasanuddin.

BPS (Badan Pusat Statistik).

2014. Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Makassar 2014. Makassar: Badan Pusat Statistik.

Edwards III, George C. 1980. Implementing Public Policy. Washington DC: Congressional Quarterly Press.

Jacques, Jean Rousseau. 1986. Kontrak Sosial, Terjemahan Sumarjo. Jakarta: Erlangga.

Komaruddin. 1994. Ensiklopedia Manajemen. Semarang: PT. Raja Grafindo Persada.

Ndraha, Talidziduhu. 2003, Kybernology 1 (Ilmu Pemerintahan Baru). Jakarta: PT. Asdi Mahasatya.

Ndraha, Talidziduhu. 2003. Kybernology 2 (Ilmu Pemerintahan Baru). Jakarta: PT. Asdi Mahasatya.

Rasyid, Ryas. 1997. Makna Pemerintahan (tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan). Jakarta: PT. Yasrif Watampone.

Subarsono. 2005. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Soekanto, Soerjono. 2002. Pemerintah: Tugas Pokok dan Fungsi. Jakarta: Bumi Aksara.

Suryaningrat, Bayu. 1992. Mengenal Ilmu Pemerintahan. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Suharto, Edi. 2006. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung: PT. Refika Aditama.

Syafi'ie, Inu Kencana. 2005. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung: PT Refika Aditama.

Thoha, Miftah. 2004. Perilaku Organisasi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Perundang-undangan :

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-undang no. 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial.
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin.
5. Peraturan walikota Makassar Nomor 34 Tahun 2009 tentang uraian tugas jabatan struktural dinas sosial kota Makassar.

Referensi lain :

1. <http://makassarkota.go.id>
2. <http://bps.go.id>

